

Tinjauan Hukum dalam e-business

Muhammad Aulia Adnan
Lembaga Kajian hukum
Teknologi- FHUI
Olyx76@yahoo.com

Hukum Kekayaan Intelektual (IPRs)

Dasar Hukum:

- UU Hak Cipta (UU No. 12/1997)
- UU Merek (UU No. 13/1997)
- UU Paten (UU No.14/1989)

Meta tags

- Tags digunakan membantu search engines untuk mengetahui isi dari suatu web-pages
- Terdapat permasalahan jika dicantumkan nama dagang, merk

Framing

Secara umum dapat diartikan sebagai:

Adalah tools yang akan dapat membagi suatu web-sites menjadi dua windows yang berbeda.

→ Who really belongs to that web-sites?

Lingking

Stop viewing content transmited from one location, and begin viewing that of another

Dibagi menjadi:

- Surface lingking
- Deep lingking

MP3

Format kompresi untuk audio yang sangat banyak digunakan pada saat ini

Contoh kasus;

MP3.com
kasus Sony Betamax

Domain Names

Pertama kali digunakan untuk memudahkan untuk menentukan lokasi dari suatu komputer atau server di internet.

Permasalahan hukum yg timbul:

- Cybersquatting
- Domain yg menggunakan merk dagang

Jurisdiction

Bagaimanakah menentukan yurisdiksi seseorang/perusahaan?

letak server (mirror), DNS, IP address, Hq Arbitrase

New York Conventions

Law Enforcement

putusan pengadilan

putusan arbitrase

Taxation

- Dimanakah suatu transaksi (taxable) terjadi?
- Bagaimanakah cara untuk mendapatkan informasi apakah suatu transaksi itu dapat dikenakan pajak?
- Bagaimanakah mendapatkan info berapa besar pajak?

Taxation in e-commerce

- Pertam kali free of tax
- Adanya protokol IOTP (Internet Open Trading Protocol) dari IETF (Internet Engineering Task Force). → Jepang, Kanada, Amerika
→ dapat "mendeteksi, menyaring" informasi yang sifatnya *taxable*

Permasalahan Hukum

Dapatkan suatu data digital (web-pages, tags, html) dijadikan bukti di pengadilan?

Bagaimanakah membuktikan bahwa suatu home-pages melanggar IPRs?

Beraniakah para hakim untuk menerapkan analogi terhadap permasalahan yg belum terdapat dalam peraturan perundangan yg ada.

Penutup

- Banyak sekali permasalahan hk yg timbul, bagaimana kesiapan para pihak (hakim, jaksa, polisi, pemerintah) dalam menghadapi hal tersebut?
- Sangat penting adanya digital signature act sebagai "umbrella act"
- Kesiapan instrumen hukum